

Analisis Efektifitas Lembaga Pengelola Hutan Nagari Dalam Mencapai Tujuan Program Perhutanan Sosial Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Studi Kasus Hutan Nagari Pakan Rabaa Dan Hutan Nagari Pasir Talang Timur Kabupaten Solok Selatan)

¹Laila Fitria, ²Yonariza, ³Ardinis Arbain
^{1,2,3} Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Korespondensi : lailafitriapenyuluh@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji efektivitas Lembaga Pengelola Hutan Nagari dalam mencapai tujuan Program Perhutanan Sosial dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Lembaga Pengelola Hutan Nagari dalam mencapai tujuan Program Perhutanan Sosial. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara, Observasi dan FGD untuk mengumpulkan data penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Pengelola Hutan Nagari dalam pelaksanaan program Perhutanan Sosial dari aspek ekologi sudah efektif, hal ini dapat dilihat dari perubahan perilaku pemegang izin yang eksploitatif menjadi peduli terhadap hutan, pemegang izin sudah berperan aktif dalam melakukan pelestarian dan perlindungan hutan yakni dengan menanam kembali tanaman hutan secara agroforestry sehingga memberikan dampak positif terhadap lingkungan berupa terjaganya sumber mata air, pengurangan lahan kritis, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pengurangan kebakaran hutan, sehingga kelestarian hutan tetap terjaga. Selanjutnya Lembaga Pengelola Hutan Nagari dalam aspek ekonomi dinilai tidak efektif karena program perhutanan sosial belum dapat meningkatkan jumlah produksi yang dihasilkan dari kegiatan usaha, jumlah keuntungan bersih dan perluasan usaha serta program ini belum membuka peluang usaha yang banyak bagi pemegang izin. Kemudian penulis juga menemukan bahwa Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial yang dibentuk di LPHN belum semuanya dapat berjalan dan bertransaksi serta kemampuan akses pasar pemegang izin dalam pemasaran produk Hasil Hutan Bukan Kayu juga masih rendah. Lembaga Pengelola Hutan Nagari dalam aspek sosial juga tidak efektif dimana LPHN belum mampu meningkatkan wawasan keanggotaan pemegang izin, terlihat dari kurangnya partisipasi anggota LPHN dalam setiap kegiatan serta belum kuatnya kapasitas kelembagaannya. LPHN juga belum mampu memberikan kepuasan kepada pemegang izin terhadap hasil yang dicapai, belum memberikan pengaruh terhadap petani.

Kata kunci: Kelembagaan, Pengelolaan Hutan, Hutan Nagari

Abstract

His study aims to examine the effectiveness of the Nagari Forest Management Institution in achieving the objectives of the Social Forestry Program and examine the factors that influence the effectiveness of the Nagari Forest Management Institution in achieving the objectives of the Social Forestry Program. This research is a qualitative research using interviews, observations and FGDs to collect research data. The results of this study indicate that the Nagari Forest Management Institute in implementing the Social Forestry program from an ecological aspect has been effective, this can be seen from changes in the behavior of exploitative permit holders to care about forests, permit holders have played an active role in preserving and protecting forests, namely by planting replanting forest plants in agroforestry manner so as to have a positive impact on the environment in the form of maintaining water sources, uprooting critical land, conserving biodiversity, and reducing forest fires, so that forest sustainability is maintained. Furthermore, the Nagari Forest Management Agency in the economic aspect is considered ineffective because the social forestry program has not been able to increase the amount of production generated from business activities, the amount of net profit and business expansion and this program has not opened up many business opportunities for permit holders. Then the authors also found that not all of the

Social Forestry Business Institutions formed at LPHN could operate and carry out transactions and the ability to access permit holders in marketing Non-Timber Forest Product products was also still low. The Nagari Forest Management Institution in the social aspect is also ineffective where the LPHN has not been able to increase the knowledge of permit holders, as seen from the lack of participation of LPHN members in every activity and the lack of strong institutional capacity. LPHN has also not been able to provide satisfaction to permit holders with the results achieved, and has not had an impact on farmers.

Keyword: Institutions, Forest Management, Nagari Forest

1. PENDAHULUAN

Kerusakan hutan merupakan masalah lingkungan paling utama di Indonesia (Yakin, 1997; Hadiyan, 2017). Eksploitasi hutan yang dilakukan secara berlebihan selama ini melalui sistem Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dan konversi hutan untuk pengembangan pertanian khususnya perkebunan telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat parah. Kerusakan hutan juga terjadi di hutan lindung dan hutan konservasi. Pada tahun 1998 data yang menunjukkan kerusakan hutan yang sangat berat akibat sistem HPH seluas 16,57 juta Ha (Kartodihardjo dan Supriono, 2000). Luas hutan konservasi dan bekas tebangan yang rusak dan perlu direhabilitasi seluas 13,7 juta Ha, sedangkan lahan kritis sekitar 22 juta Ha (KMM Kehutanan, 2000 dalam Hakim, 2001). Djajadiningrat (dalam UNDP, 1997) menyatakan bahwa 12 juta ha hutan konversi telah diubah menjadi lahan pertanian, dan 4,8 juta ha untuk kegiatan pertambangan, sedangkan hutan konversi yang tersisa hanya 13,2 juta ha.

Di Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Dishut, 2020), perkembangan Perhutanan Sosial sampai Juni 2020 yaitu seluas 227.673 ha dari target seluas 500.000 ha. Realisasi ini terdiri atas 98 unit hutan nagari seluas 184.843 ha, Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebanyak 48 unit dengan luas 32.702 ha, Hutan tanaman Rakyat (HTR) sebanyak 8 unit dengan luas 2.247 ha, Kemitraan Kehutanan sebanyak 6 Unit dengan luas 938.98 ha dan Hutan Adat sebanyak 6 unit dengan luas 6.942 ha. Dari luasan tersebut dapat kita lihat bahwa hutan nagari memiliki luasan terbanyak dari skema perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Barat. Program Hutan Nagari merupakan salah satu skema Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, mengurangi konflik permasalahan lahan di masyarakat dan membantu mengatasi kemiskinan. Skema Hutan Nagari memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat (Rubinsky, 2018).

Dengan adanya Hutan Nagari yang dikelola oleh masyarakat telah memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara ekonomi dan ekologi. Secara ekonomi, dengan adanya hutan nagari masyarakat memperoleh sumber pendapatan. Sedangkan secara ekologi, masyarakat tidak lagi melakukan penebangan liar sehingga ini akan mengurangi terjadinya erosi dan banjir selain itu hutan tetap terjaga secara lestari (Agustini, Darmawan dan Putri, 2017). Hutan Nagari telah mendorong partisipasi masyarakat dalam melindungi, mengelola dan memanfaatkan hutan dan telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam hal pendapatan dan kondisi lingkungan sekitar (Zulevi, 2017).

Di Kabupaten Solok Selatan, saat ini terdapat 14 (empat belas) unit Hutan Nagari (seluas ±31.455 ha) yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam pelaksanaan yang sudah berjalan selama 7 tahun ini, program Hutan Nagari belum berjalan efektif dalam mencapai tujuannya. Fauzi, Chandra, Khatimah dan Wicaksono (2019) menyatakan bahwa kontribusi langsung Hutan Nagari terhadap pendapatan masyarakat masih rendah dan izin Hutan Nagari belum mampu sepenuhnya dapat menekan laju kehilangan tutupan pohon. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh lembaga nirlaba internasional World Resources Institute

(WRI) Indonesia bahwa di Hutan Nagari Simancuang terjadi peningkatan kehilangan laju tutupan pohon dari 0,66 ha menjadi 1,33 ha per tahun (Fauzi *et al.*, 2019).

Uphoff (1986) dan Johnson (1985) dalam Anantanyu (2011) mengungkapkan bahwa kelembagaan adalah salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pengembangan dan peningkatan pembangunan pertanian selain teknologi, sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia. Selain itu, keberadaan kelembagaan merupakan struktur penting yang akan memandu kehidupan masyarakat (Mowo, Adimassu, Masuki, Lyamchai, Tanui & Catacutan, 2011) (Trio, S., Sulaiman, Z., Reno, A., Khairul, A., & Arya, P. R. 2023). Tujuan penelitian ini untuk (1) mengkaji efektivitas Lembaga Pengelola Hutan Nagari dalam mencapai tujuan Program Perhutanan Sosial (2) mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Lembaga Pengelola Hutan Nagari dalam mencapai tujuan Program Perhutanan Sosial.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti; kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka (Sulistyo dan Basuki, 2006). Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan bukan angka dari orang-orang dan pelaku yang diamati (Moleong, 2006).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai dengan penulisan laporan, sehingga pengumpulan data dan analisis data merupakan dua hal yang tidak terpisah. Adapun tahapan yang dilakukan untuk menemukan jawaban pertanyaan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengumpulkan data yang relevan dan catatan hasil wawancara;
- b. Menginterpretasikan hal-hal yang ditemukan dan diklasifikasikan berdasarkan indikator data yang telah ditentukan;
- c. Menyajikan hasil temuan dan membandingkan hasil temuan dengan teori efektivitas yang dilihat dari derajat pencapaian tujuan, usaha yang dilakukan dalam mencapai tujuan dan tingkat kepuasan terhadap tujuan yang sudah dicapai atau usaha yang dilakukan.
- d. Membangun asumsi atau hipotesis tentang kelembagaan Hutan Nagari yang efektif serta faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan tersebut.
- e. Menguji kembali asumsi atau hipotesis yang dibangun berdasarkan data-data yang telah terkumpul dan hasil penelitian lain yang relevan;
- f. Menarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Lembaga Pengelola Hutan Nagari

Efektivitas kelompok merupakan kemampuan kelompok dalam mencapai tujuannya. Hal tersebut dapat tercermin dari perubahan perilaku pengurus dan pemegang izin, perubahan produktivitas kelompok, Wawasan Keanggotaan, tingkat keberhasilan kegiatan, moral kelompok/ tingkat kepuasan dari para anggota terhadap kelompok dan Imbas Kelompok.

1. Perubahan Perilaku Pengurus dan Pemegang Izin

- a. LPHN Pakan Rabaa

s1) Kegiatan yang sifatnya Eksploitatif

Setelah mendapatkan izin/hak kelola, perubahan perilaku pengurus dan anggota kelompok pemegang akses kelola perhutanan sosial mengalami perubahan. Mulai dari perilakunya terhadap kawasan hutan yang dulunya eksploitatif, cara memandang potensi sumberdaya hutan sebagai sumber mata pencarian, keinginannya untuk berkembang secara mandiri dan sebagainya. Tindakan mengambil dan menggunakan sumber daya hutan dan hasil hutan secara semena-mena tanpa mempertimbangkan segi keberlanjutan (sustainability) untuk masa depan. Seperti : Pembakaran hutan untuk pembukaan lahan, pembukaan tambang, illegal logging (pembalakan liar) dan perburuan hewan sudah mulai berubah. Saat ini masyarakat melakukan pengambilan kayu dalam kawasan hutan nagari hanya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat, tidak lagi untuk diperdagangkan. Erman (ketua LPHN) menjelaskan:

“...kini kami ma ambiak kayu ka hutan nagari hanyo untuk buek rumah sajo jo untuk kaperluan nagari, seperti: untuk buek mushalla, pos rundo dan lain sebagainya, kalo dulu sabalun ado hutan nagari kami ma ambiak kayu untuk dijual manjadi pitih...” (aktivitas pengambilan kayu saat ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pembuatan rumah dan fasilitas umum bukan lagi untuk perdagangan).

Tindakan atau aktivitas yang dilakukan pengurus dan pemegang izin untuk mengambil keuntungan ataupun memanfaatkan hutan secara berlebihan dan penuh dengan kesewenang-wenangan sudah berubah terutama dalam hal illegal logging, illegal mining dan pembukaan lahan. Dimana dulu sebelum terbentuk hutan nagari kawasan hutan Pakan Rabaa tergolong rawan terhadap tiga hal tersebut. Setiap hari ada saja orang yang masuk kedalam hutan membawa peralatan, alat berat, gergajimesin. Alat berat digunakan untuk menggali tanah yang mengandung emas, gergaji mesin untuk menebang kayu yang besar-besar. Mereka menganggap bahwa hutan adalah sebagai sumber mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sesuai dengan pendapat Irnawati (2015) mengatakan masyarakat yang menganggap hutan sebagai ladang sumber mata pencarian memiliki perilaku yang eksploitatif. Selanjutnya Mayanti dan Anwar (2018) juga mengatakan bahwa perilaku muncul karena didorong oleh serangkaian kebutuhan, biasanya petani memenuhi kebutuhan dengan mengelola lahan untuk dijadikan kebun mereka.

2). Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

Pemanfaatan hutan merupakan kegiatan dalam memanfaatkan lahan hutan termasuk jasa lingkungan, memanfaatkan dan mengambil hasil hutan kayu dan non kayu secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Sutrisno (2014) mengatakan bahwa sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Jenis pemanfaatan sumber daya alam yang diakses oleh LPHN Pakan Rabaa merupakan sumber daya Alam dalam kawasan hutan milik negara yang berarti status kepemilikannya secara tegas dikontrol dalam pemanfaatannya. Studi yang dikemukakan Yuliani, F., & Saputr, T. (2023), Hidayat (2011) menjelaskan bahwa sumber daya yang dimiliki negara merupakan suatu sumber daya yang statusnya dikuasai dan aktivitasnya diatur dan dikontrol oleh negara. Dalam pemanfaatan areal kelola LPHN Pakan Rabaa menerapkan sistim agroforestry yaitu mengkombinasikan antara tanaman pertanian dan kehutanan (Olivia dan Qurniati., 2015; Safe'i dan Wulandari., 2019; Zainuddin dan Sribianti, 2018).

LPHN mengembangkan jenis tanaman Mahoni, Surian, Petai, Jengkol dan Durian sebagai tanaman utama dari komoditi kehutanan. Kopi ditanam disela-sela tanaman kehutanan. Menurut Pratiwi dan Kaskoyo (2019) pada sistem agroforestri, salah satu komoditas yang dapat dibudidayakan yaitu tanaman kopi. Jenis lain yang dikembangkan LPHN yaitu jenis Hasil Hutan Bukan Kayu, seperti Jahe, Gardu Munggu, Kulit Manis, Coklat, karet dan pinang. Luas lahan yang dikelola masing-masing LPHN minimal 0,5 Ha dan maksimal 2 Ha agroforestry tidak hanya mempertimbangkan aspek konservasi lingkungan, tapi juga harus memperhatikan aspek profitabilitas dan keuntungan

sosial yang mungkin akan diperoleh oleh masyarakat sekitar. Agroforestri merupakan cara terbaik untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang sudah ada.

Pada Program Perhutanan Sosial, Agroforestry diartikan sebagai sistem pengelolaan hutan dengan menerapkan pola budidaya tanaman hutan dengan tanaman pertanian, peternakan dan perikanan baik pada saat sama atau berurutan untuk meningkatkan produksi dan kelestarian hutan. Secara umum Agroforestry adalah manajemen pemanfaatan hutan secara optimal dan lestari, dengan cara mengkombinasikan kegiatan kehutanan dan kegiatan pertanian pada unit pengolahan lahan yang sama dengan memperhatikan kondisi lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berperan serta.

Kawasan hutan yang digunakan untuk areal agroforestry adalah ladang masyarakat yang sudah terbuka sebelum terbentuknya hutan nagari, masyarakat tidak lagi melakukan pembukaan lahan untuk berladang melainkan memanfaatkan lahan yang sudah ada. Hasil wawancara dengan anggota LPHN (Syafrial) mengatakan :

‘...sajak jadi hutan nagari kami alah ndak ado membuka lahan, kami baladang hanyo dikarapuan-karapuan yang dibuka sabalun hutan nagari ado. Ladang kami tanami dengan bibit yang diberi oleh LSM Warsi dan Dinas Kehutanan...’ Semenjak ditetapkan sebagai hutan nagari masyarakat sudah tidak ada lagi melakukan pembukaan lahan, mereka hanya berladang pada lokasi yang sudah dibuka sebelum hutan nagari terbentuk.

Program perhutanan sosial telah merubah perilaku pengurus dan pemegang izin dalam hal pemanfaatan hutan dimana sebelum terbentuknya hutan nagari masyarakat berlomba-lomba untuk membuka lahan untuk berladang akan tetapi setelah ditetapkan sebagai kawasan hutan nagari mereka sudah tidak punya keberanian lagi untuk membuka lahan. Mereka cukup dengan memanfaatkan ladang yang sudah ada yang ditanami dengan pola agroforestry.

3) Pemeliharaan dan Perlindungan Hutan

Untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari maka perlu menyelenggarakan perlindungan hutan. Perlindungan hutan dalam hal ini adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan (PP No. 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan).

Pemeliharaan dan perlindungan hutan merupakan salah satu tugas pokok dari Lembaga Pengelola Hutan Nagari. Dimana salah satu kewajiban LPHN adalah melakukan perlindungan dan pengamanan hutan di kawasan hutan nagari. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah patroli terhadap gangguan keamanan hutan seperti pencurian kayu dan kebakaran hutan. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan masyarakat yang aktivitas sehari-harinya masih tergantung dengan keberadaan hutan itu sendiri. Ekawati (2013) menyebutkan bahwa masyarakat memiliki peranan yang kuat dalam rangka kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, karena masyarakat merupakan unsur utama pada pengelolaan hutan.

Dalam pelaksanaannya, dalam struktur organisasi LPHN terdapat tim patroli yang fungsi dan tugasnya melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap hutan. Tim ini beranggotakan 5 orang. Untuk memudahkan tim patroli dalam melakukan tugasnya, maka pada Tahun 2017 LSM Warsi memberi bantuan pada LPHN Pakan Rabaa dan Pasir Talang Timur berupa *Smart Forest Quardian*. Masing-masing LPHN mendapat 3 unit. *Smart Forest Guardian* merupakan alat pendeteksi suara yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Dalam penerapannya, teknologi tersebut akan secara otomatis mendeteksi suara gergaji, suara tembakan, dan berbagai aktivitas mencurigakan lainnya. Teknologi ini

mampu membedakan suara satwa yang ada di kawasan hutan. Dengan begini, selain melindungi hutan, teknologi ini juga bisa melindungi satwa yang hidup di dalam kawasan hutan. Semenjak dipasangnya *smart forest Quardian* maka tim patroli turun ke lokasi disaat ada notifikasi melalui HP Android salah satu anggota Tim patrol yang sudah dilatih dalam menggunakannya. Alat ini dipasang pada tiga titik yakni di Sungai Languang, Bukik Palanta dan Bukik Patambuhan.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi efektifitas Lembaga Pengelola Hutan Nagari

Faktor yang mempengaruhi efektivitas kelompok tani dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga faktor. *Pertama* faktor ciri kelompok yaitu terdiri dari kepemimpinan kelompok, kekompakan dan intensitas pertemuan kelompok. *Kedua* faktor kerja atau fungsi tugas yaitu terdiri dari fungsi memberi informasi, fungsi menyelenggarakan koordinasi, fungsi menghasilkan inisiatif dan fungsi menjelaskan. *Ketiga* faktor luar kelompok yaitu terdiri dari dukungan pemimpin formal dan nonformal dan kondisi fisik lokasi kelompok.

Faktor Ciri Kelompok

Faktor ciri kelompok yaitu terdiri kepemimpinan kelompok, kekompakan dan intensitas pertemuan kelompok.

a. LPHN pakan Rabaa

1) Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah suatu interaksi antara dua orang atau lebih anggota yang tak jarang meliputi penyusunan struktur atau perubahan stuktur dari situasi serta persepsi para anggota. oleh karena itu kepemimpinan akan timbul saat ketua kelompok bisa memotivasi atau memberi kompetensi pada yang lain pada kelompok. Ketua kelompok menggunakan kepemimpinannya yg tergolong baik atau sangat tinggi tersebut akan memberikan peluang yang sangat besar buat tercapainya keefektifan di kelompok yg dipimpinnya. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mengatur, mengelola, ataupun mengendalikan setiap aspek dalam kelompok agar dapat mencapai tujuan. Kriteria pemilihan ketua kelompok antara lain berdasarkan pengetahuan, sifat, perilaku, dan pengalamannya. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap gaya dalam memimpin. Menurut pendapat Roscahyo (2013) bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin sangat mempengaruhi keberhasilan kelompok dalam mencapai tujuan. Selain itu, perilaku pemimpin memiliki dampak yang besar terkait dengan sikap dan perilaku bawahan, dimana akhirnya mempengaruhi kinerja.

Dari hasil observasi dilapangan pada LPHN Pakan Rabaa bahwa kepemimpinan ketua LPHN belum berjalan dengan baik, keberadaan ketua dalam kelompok hanya formalitas saja. Kemampuan ketua dalam menerima informasi dan menyampaikan informasi ke anggota agak kurang sehingga ketuabelum mampu memberikan kejelasan informasi, mengendalikan tingkah laku anggotanya dan belum mampu menjadi juru bicara dalam kelompoknya. Ini terlihat dari setiap kegiatan yang dilakukan kelompok selalu diwakilkan oleh Sekretaris, sekretaris sering menjadi juru bicara disetiap pertemuan. Yunasaf (2005) mengatakan bahwa semakin baik kepemimpinan ketua kelompok, maka akan semakin efektif kelompok tani yang dipimpinnya tersebut.

2) Kekompakan

Kekompakan didalam kelompok diukur dari hubungan interpersonal antar kelompok, peran anggota pada kegiatan kelompok dan kerjasama antar anggota. Sebuah kelompok dapat dikatakan kompak apabila didalam suatu kelompok tidak terdapat suatu pertentangan dan anggota kelompok saling menguatkan satu sama lainnya dan bersatu untuk mewujudkan tujuan kelompok. Menurut pendapat cartwright dan zander dalam purwanto dan huraerah (2006) kekompakan kelompok merupakan hasil dari semua tindakan yang memperkuat anggota untuk tetap tinggal dalam kelompok. Menurut Nitimiharjo dan iskandar (1993) kekompakan kelompok

merupakan tingkat kebersamaan yang menggambarkan ketertarikan anggota kelompok terhadap kelompoknya.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di LPHN Pakan Rabaa dalam LPHN belum terjalin hubungan yang baik antar anggota, baik didalam kelompok maupun di luar kelompok. Disamping itu tidak semua anggota selalu berperan dalam setiap kegiatan kelompok, dengan kurang terjalinnya hubungan yang baik antar anggota dan kurangnya peran anggota dalam setiap kegiatan maka tidak tercipta kerjasama yang baik antar anggota berdasarkan tujuan kelompok.

1) Intensitas Pertemuan Kelompok

Intensitas pertemuan kelompok diukur dari Frekuensi pertemuan dan kualitas pertemuan yang berkaitan dengan kesesuaian materi dan kesesuaian waktu pertemuan dengan waktu senggang anggota. Intensitas pertemuan kelompok dapat memupuk rasa gotong royong antar sesama anggota LPHN sehingga dalam pelaksanaannya dapat meringankan beban pekerjaan dan biaya (Mayasari dan Nangameka, 2012). Frekuensi pertemuan disesuaikan dengan waktu senggang anggotanya. Intensitas pertemuan kelompok disesuaikan kebutuhan anggota, yang memanfaatkan waktu luang (Sumantri dan Hastuty, 2018). Materi yang diberikan juga disesuaikan dengan kebutuhan anggota kelompok. Pertemuan kelompok adalah komunikasi antara beberapa orang dalam suatu kelompok seperti dalam rapat.

Pertemuan kelompok tani biasanya diadakan ketika akan melakukan kegiatan dan setelah panen untuk bahan evaluasi kegiatan kedepannya agar lebih baik (Mandasari, 2014). Penguatan kelembagaan kelompok tani juga dilakukan melalui kegiatan pendampingan dan pertemuan atau musyawarah petani dengan dihadiri tokoh masyarakat, penyuluh kehutanan dan instansi terkait sehingga kelompok tani yang terbentuk makin terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan pendapatan dari usahatani (Nuryanti dan Swastika, 2011).

Dari Hasil wawancara dengan LPHN Pakan Rabaa pertemuan dilakukan setiap tanggal 16 tiap bulannya. Sebagian anggota LPHN selalu mengikuti kegiatan kelompok tersebut karena mereka membutuhkan informasi dalam rangka meningkatkan usahanya. Selain itu pertemuanyang dilaksanakan oleh kelompok disekretariat LPHN selalu dihadiri oleh pendamping dari LSM warsi dan penyuluh sehingga petani bisa mendapatkan informasi yang mereka perlukan dan mereka dapat menyampaikan segalasesuatu yang menjadipermasalahan mereka. Partisipasi anggota LPHN menunjukkan bahwa anggota LPHN termasuk aktif dalam mengikuti rapat dan agenda kelompok hal ini terlihat dari kehadiran anggota diatas 50% dari jumlah keseluruhan anggota sebanyak 20 Orang.

4. KESIMPULAN

1. Lembaga Pengelola Hutan Nagari dalam pelaksanaan program Perhutanan Sosial dari aspek ekologi sudah efektif dimana telah merubah perilaku pemegang izin yang eksploitatif menjadi peduli terhadap hutan, pemegang izin sudah berperan aktif dalam melakukan pelestarian dan perlindungan hutan yakni dengan menanam kembali tanaman hutan secara agroforestry sehingga memberikan dampak positif terhadap lingkungan berupa terjaganya sumber mata air, pengurangan lahan kritis, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pengurangan kebakaran hutan, sehingga kelestarian hutan tetap terjaga. Untuk angka pembalakan liar sudah dapat ditekan seminimal mungkin. Sudah terjadi penurunan angka pembalakan liar di Hutan Nagari Pakan Rabaa dan Pasir Talang Timur pasca pemberlakuan skema hutan nagari ini.
2. Lembaga Pengelola Hutan Nagari dalam aspek ekonomi tidak efektif dimana program perhutanan sosial belum dapat meningkatkan jumlah produksi dihasilkan dari kegiatan usaha,

jumlah keuntungan bersih dan perluasan usaha serta program ini belum membuka peluang usaha yang banyak bagi pemegang izin. Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial yang dibentuk di LPHN belum semuanya dapat berjalan dan bertransaksi serta kemampuan akses pasar pemegang izin dalam pemasaran produk Hasil Hutan Bukan Kayu juga masih rendah.

3. Lembaga Pengelola Hutan Nagari dalam aspek sosial juga tidak efektif dimana LPHN belum mampu meningkatkan wawasan keanggotaan pemegang izin, terlihat dari kurangnya partisipasi anggota LPHN dalam setiap kegiatan serta belum kuatnya kapasitas kelembagaannya. LPHN juga belum mampu memberikan kepuasan kepada pemegang izin terhadap hasil yang dicapai, belum memberikan pengaruh terhadap petani sekelilingnya dan belum berkontribusi terhadap pembangunan nagari setempat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas Lembaga Pengelola Hutan Nagari

- a. Faktor yang mempengaruhi efektifitas Lembaga Pengelola Hutan Nagari adalah faktor keberadaan dan peranan pemimpin dalam LPHN. Seberapa besar pengaruh karakter dan kepribadian ketua dalam meningkatkan kinerja anggota sangat tergantung pada seberapa besar pula ketua bisa bertindak dan berperilaku yang dapat memotivasi anggota untuk selalu meningkatkan kinerja.
- b. Efektifitas Lembaga Pengelola Hutan Nagari juga dipengaruhi oleh fasilitasi yang dilakukan oleh pihak luar, seperti pemerintah daerah dan juga lembaga non pemerintah.

5. SARAN

- a. Perlu dilakukan Pengawasan manajemen LPHN untuk menghindari hal-hal yang mengganggu stabilitas kelembagaan seperti macetnya koordinasi antar pengurus maupun dengan anggota. Pemberian reward (penghargaan) bagi pengurus berprestasi dan anggota yang aktif dalam kegiatan LPHN dapat memacu persaingan sehat diantara pengurus dan anggota. Sehingga masing-masing individu yang tergabung dalam LPHN mampu memaksimalkan peran dan kemampuannya untuk berkontribusi penuh dalam memajukan lembaga yang telah memberikan kebermanfaatan bagi mereka. Secara tidak langsung loyalitas dan totalitas mereka akan terlihat jelas dalam prosesnya. Pemberian Sanksi tegas secara administrasi sebaiknya dikenakan kepada LPHN pasif, yaitu LPHN yang tidak menunjukkan tanda-tanda keaktifan sama sekali, baik pengurus maupun anggotanya.
- b. Perlu dilakukan reorientasi dan pemahaman paradigma baru mengenai LPHN agar masyarakat paham bahwa setiap individu berperan penting dalam memajukan eksistensi lembaga yang berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan taraf hidup masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Agera, S.I.N. 2011. Role of beekeeping in the conservation of forests. Global Journal Of Agricultural Sciences Vol 10, NO. 1: 27-32
- [2] Agung, R. 2013. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap kinerja Karyawan Pada rumah Sakit Siti Khotidjah Sidoarjo. Jurnal STIESIA Surabaya. Hlm. 1-16
- [3] Agus, S. 2008. Analisis Efektivitas Kelompok Tani Hamparan di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. Surakarta : Universitas Sebelas Maret

- [4] Hadiyan.Y., Yuliah dan H. Pambudi. 2017. Memahami dan Membangun Pendekatan Penyelesaian Deforestasi dan Degradasi Hutan di Region Sumatera dan Kalimantan. Proceeding Biology Education Conference Volume 14, Nomor 1 Halaman 166-169.
- [5] Jasmi., Syarifuddin., and D.P Putra. 2020. Propagation of *Apis cerana* Fabr. (Hymenoptera: Apidae) prospective queen bee. *Serangga* 25(2):80-95.
- [6] Junaidi, E dan R. Maryani. 2013. Pengaruh Dinamika Spasial Sosial Ekonomi Pada Suatu Lanskap Daerah Aliran Sungai (Das) Terhadap Keberadaan Lanskap Hutan (Studi Kasus Pada Das Citanduy Hulu Dan Das Ciseel, Jawa Barat). *E-Journal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*.
- [7] Trio, S., Sulaiman, Z., Reno, A., Khairul, A., & Arya, P. R. (2023). Civil Society Participation In Natural Resource Management In Conservation Areas: An Empirical Study Of Tesso Nilo National Park, Riau Province. *Вопросы государственного и муниципального управления*, (5S1), 48-68.
- [8] Yuliani, F., & Saputr, T. (2023). Policies For Overcoming Forest And Land Fires On Peatlands From The Perspective Of Inter-Organizational Networks In Indonesia. *BiLD Law Journal*, 8(1), 53-61.